



## Pemkot Klaim Terus Tingkatkan Sekolah Inklusi

● SILVYDIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA – Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus mengembangkan sekolah inklusi bagi anak penyandang disabilitas. Hal tersebut ia katakan setelah anak penyandang disabilitas mengeluhkan susah akses untuk mendapatkan pendidikan di Kota Yogyakarta.

"Di Kota Yogyakarta, pendidikan inklusi selalu kita kembangkan. Kota Yogyakarta ini memberikan layanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu jauh lebih dulu dari pada daerah lain," kata Edy di Science Theater Taman Pintar Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Ia mengungkapkan, hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta nomor 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggara-

an Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta. Perwal itu sendiri, lanjutnya, bahkan lebih dulu dikeluarkan dari pada kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kita lebih mendahului dari pada kebijakan kementerian. Dari tahun ke tahun kita menambah jumlah sekolah pelaksana pendidikan inklusi. Sampai kemudian kita menerbitkan Perwal tentang pendidikan inklusi di tahun 2008, sementara dari parlemen itu baru 2009," katanya.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta, selalu dilakukan penambahan sekolah inklusi bagi anak penyandang disabilitas. Bahkan, pihaknya juga membentuk unit pelayanan teknis (UPT) untuk mengurus terkait pendidikan bagi penyandang disabilitas.

"UPT ini yang mengurus sekolah-sekolah inklusi, memberikan pelatihan bagi guru dan menyiapkan sekolah sebagainya. Selain itu juga menge-

dukasi masyarakat tentang pendidikan inklusi," katanya.

Ke depannya, sekolah-sekolah inklusi akan terus ditambah. Ia pun menargetkan, tahun depan semua sekolah di Kota Yogyakarta sudah ada kurikulum untuk pendidikan inklusi.

"Tahun ini sudah ada beberapa sekolah yang mengajukan untuk diberi pelatihan tentang layanan pendidikan inklusi. Sekarang ini Paud dan TK di Kota Yogyakarta sudah sekolah inklusi. SD, SMP itu ada 65 sekolah inklusi. Belum lagi SMA dan SMK yang juga sudah menyelenggarakan sekolah inklusi yang dikelola provinsi," katanya.

Sebelumnya, penyandang disabilitas menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Yogyakarta. Mereka menilai Pemkot masih kurang memperhatikan penyandang disabilitas. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti fasilitas khusus untuk disabi-

litas bahkan belum memenuhi syarat.

"Kondisi sekarang, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat. Masih banyak anak sekolah yang belum mendapatkan kesempatan sekolah. Banyak penyandang disabilitas belum mendapat akses kesehatan dengan mudah," kata Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) Arni Surwanti saat menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, penyandang disabilitas yang tergabung dalam FPHPD terus mendorong agar terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta. Sebab, saat ini belum ada payung hukum yang mengatur terkait perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. ■ ed: lerman rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005